

Meluruskan Supersemar

Bagian Pertama dari Dua Tulisan

SAMPAI sekarang ini, perbincangan mengenai Supersemar masih sangat menarik. Meski sudah hampir setengah abad berlalu, namun surat sakti ini masih menyimpan sejumlah rahasia dan kontroversi. Tidak ada yang berani mengungkap berbagai kejanggalan seputar Supersemar saat Orde Baru masih berkuasa. Setelah Orde Baru tumbang barulah sekian banyak analisis bermunculan. Termasuk soal upaya Bung Karno menentang penyalahgunaan Supersemar yang diberikan kepada Letjen Soeharto.

Sejarah tidak dapat lepas dari konteks ruang dan waktu. Maka berbicara mengenai "kapan" menjadi satu hal yang penting dan patut diperhatikan. Asvi Warman Adam (2007) dalam bukunya menceritakan kronologis lahirnya Supersemar. Brigjen M. Jusuf, salah seorang dari tiga jenderal yang menemui Bung Karno di Istana Bogor, mengungkapkan bahwa mereka bertemu

Oleh: Hendra Kurniawan

tanggal 11 Maret 1966 sejak sore hingga pukul 20.30. Letkol Ali Ebram dari Tjakrabirawa juga mengungkapkan bahwa dirinya butuh waktu satu jam untuk mengetik surat tersebut dengan didiktekan oleh Bung Karno.

Dari rentetan waktu yang cukup lama ini menunjukkan bahwa pembicaraan berjalan alot. Tampaknya muncul berbagai argumentasi dan perdebatan soal penting atau tidaknya dibuat suatu surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengamankan situasi. Tarik ulur ini konon melibatkan pula Hartini (istri Bung Karno) dan dr. Soebandrio (Wakil Perdana Menteri I) yang turut memberi masukan. Pada akhirnya Bung Karno setuju menandatangani Supersemar.

Tanggal 12 Maret 1966 dini hari, tepatnya pukul 01.00, Sekretaris Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) Brigjen Budiono meminta



Sudharmono (kelak menjadi wakil presiden kelima) untuk memperbanyak Supersemar. Rupanya konsep mengenai pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah disiapkan beberapa jam sebelumnya di MBAD, namun saat itu masih muncul persoalan mengenai landasan hukumnya.

Kini dengan berbekal Supersemar, keputusan mengenai pembubaran PKI dapat memiliki landasan hukum.

Tanggal 12 Maret 1966 tepat pukul 06.00, Letjen Soeharto atas nama Presiden mengumumkan Keppres Nomor 1/3/1966 yang berisi pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, serta menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Supersemar berhasil dijadikan alat untuk melegalkan pembubaran sebuah partai yang sebenarnya wewenang itu ada di tangan Presiden. Letjen Soeharto juga memerintahkan

pasukan RPKAD dan Kostrad untuk melakukan *show of force* satuan-satuan ABRI bersama rakyat di jalanan sebagai bentuk dukungan psikologis terhadap keputusan itu.

Tindakan berani ini dilanjutkan dengan keluarnya seruan agar aparaturnegara baik di pusat maupun daerah menjaga kelancaran roda pemerintahan. Tanggal 14 Maret 1966, Letjen Soeharto mengeluarkan perintah wajib lapor bagi anggota dan kader atau simpatisan PKI kepada pejabat-pejabat yang berwenang di daerah masing-masing. Pada tanggal 18 Maret 1966, Letjen Soeharto bertindak lebih jauh dengan melakukan perombakan paksa terhadap Kabinet Dwikora yang Disempurnakan. Letjen Soeharto mengeluarkan Pengumuman Presiden Nomor 5 tentang penangkapan (tepatnya penangkapan) menteri-menteri kabinet yang loyal terhadap Bung Karno dengan tuduhan terma Gerakan 30 September. ***

Hendra Kurniawan MPd. Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

WACANA

BERNAS JOGJA

Meluruskan Supersemar

Bagian Terakhir
dari Dua Tulisan

Oleh: Hendra Kurniawan

MENCERMATI semakin jauhnya pelaksanaan Supersemar dari tujuan semula, bukan hal yang aneh apabila Bung Karno pernah berupaya secepatnya melakukan tindakan untuk mengerem laju Supersemar. Pada tanggal 13 Maret 1966, dua hari setelah Supersemar, Bung Karno mengeluarkan surat perintah susulan kepada Letjen Soeharto melalui Waperdam II dr. Johannes Leimena, tetapi Letjen Soeharto tidak memberikan reaksi. Konon dalam surat ini Bung Karno mengingatkan Letjen Soeharto bahwa Supersemar sifatnya teknis sebagai tugas menjaga keamanan situasi dan bukan tindakan politis seperti pembubaran partai. Letjen Soeharto juga diminta untuk melaporkan segala tindakannya itu pada presiden.

Keluarnya Surat Perintah Susulan 13 Maret 1966 menegaskan bahwa Letjen Soeharto telah menggunakan Supersemar sebagai sebuah *transfer of authority*. Seolah-olah Bung Karno menyerahkan seluruh kekuasaannya melalui Supersemar. Sejatinnya Supersemar merupakan perintah presiden (*executive order*) yang terbatas pada soal keamanan dan ketertiban. Menariknya dalam berbagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) pada bulan-bulan ini menyebut istilah "pemerintahan yang baru". Artinya AS tidak keberatan dan mendukung upaya meminggirkan Bung Karno.

Bung Karno kembali menegaskan mengenai kedudukan Supersemar dalam Pidato HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1966

yang berjudul "Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah (Jasmerah)". Berikut ini kutipan bagian mengenai Supersemar dalam pidato tersebut: "Surat Perintah Sebelas Maret itu mula-mula dan memang sejourus waktu membuat mereka bertampik sorak-sorai kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah suatu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu, suatu *transfer of sovereignty, of authority*. Padahal tidak! SP 11 Maret adalah suatu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu juga perintah pengamanan keselamatan pribadi Presiden. Perintah pengamanan wibawa Presiden. Perintah pengamanan ajaran Presiden. Perintah pengamanan bebe-

rapa hal. Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini!"

Pidato ini merupakan bukti otentik dan menjadi sumber primer untuk menjawab berbagai kontroversi seputar Supersemar. *Pertama*, membantah keraguan mengenai ada tidaknya Supersemar karena Bung Karno sendiri mengakui dan menyebutnya dalam pidato tersebut. *Kedua*, membantah dugaan bahwa Bung Karno mengeluarkan Supersemar di bawah ancaman todongan pistol. *Ketiga*, menegaskan bahwa Supersemar bukanlah suatu peralihan kekuasaan. Pada akhirnya memang Supersemar perlu ditempatkan sebagai bagian dari sejarah bangsa ini secara objektif. ***

Hendra Kurniawan MPd, Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta